

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara khususnya ASEAN telah meduduki posisi penting bagi kebijakan ekonomi serta luar negeri Jepang pasca tahun 1945. Jepang sebagai mitra ASEAN telah banyak berkontribusi, dari pertengahan tahun 1950-an hingga ke tahun 1960-an masa dimana tensi konfrontasi meningkat antara hubungan Indonesia dan Malaysia, sampai dengan tahun 1990an hingga seterusnya telah mengikutsertakan Jepang dalam menyelesaikan perang saudara di Kamboja dan ketegangan di Timur Leste, Jepang telah memainkan peranan pentingnya dalam mediasi politik di wilayah Asia Tenggara. Jepang juga menjadi mitra perkembangan strategis, dengan bantuan pembangunannya atau *Official Development Assistance* (ODA) terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan mengembangkan model perkembangan rencana rasionalnya sebagai panduan untuk modernisasi ekonomi di wilayah regional (Masahiro Kawai, 2016: 4).

Sebagai mitra strategis ASEAN, Jepang sejak awal terbentuknya ASEAN telah melakukan berbagai kerjasama dan memberikan bantuannya di berbagai bidang seperti di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan-lain-lain. Di tahun 2001 terlihat bahwa volume perdagangan ekspor dan impor antara ASEAN dengan Jepang mencapai USD 13,196,300 yang merupakan 14% dari jumlah keseluruhan perdagangan Jepang. Di bidang Investasi, Investasi langsung Jepang di ASEAN mencapai USD 426,400 (tahun fiskal 2002), jumlah tersebut merupakan 11% dari total investasi Jepang di luar negeri (Kedutaan Besar Jepang, 2016)

Jepang memiliki andil yang besar bagi pembangunan ASEAN melalui ODA yang dipusatkan pada konsolidasi prasarana ekonomi-sosial serta pendidikan sumberdaya manusia. Pada saat krisis ekonomi melanda Asia di tahun 1997, Jepang memberikan bantuan bagi penanggulangan krisis ekonomi, bantuan bagi negara-negara anggota ASEAN telah diberikan. Demi mencegah terulangnya krisis ekonomi tersebut maka perlu adanya sumber daya manusia yang handal.

Maka di tahun 1999, di KTT ASEAN+3 (Jepang, Cina, Korea) diajukan usulan program pertukaran yang terdiri dari 10 pokok (*Obuchi Plan*). Hingga saat ini terus berlangsung bantuan keuangan dan bantuan pengembangan sumberdaya manusia bagi negara-negara anggota ASEAN.

Selain melakukan kerjasama bilateral dengan masing-masing negara anggota ASEAN, Jepang juga menjalin kerjasama pembangunan dengan lingkup yang lebih luas, salah satunya adalah pengembangan daerah sungai mekong, sungai yang dilewati sekaligus oleh 5 negara ASEAN yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar dan Laos. Proyek pembangunan ini difokuskan pada pembangunan jalan dan fasilitas pelabuhan. Meskipun ASEAN banyak mendapatkan bantuan dari negara-negara mitra seperti Jepang, Korea, China, Australia atau negara-negara mitra regional lainnya untuk pembangunan ekonomi. Integrasi ASEAN masih belum berjalan dengan efektif terlebih lagi dengan negara anggota termuda ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar yang disingkat CLMV yang memiliki perbedaan kesenjangan ekonomi dengan negara ASEAN-6 (Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand).

The Initiative for ASEAN Integration yang disingkat IAI diluncurkan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN pada pertemuan tingkat tinggi tahun 2000 di Singapura yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, mempercepat integrasi ekonomi serta bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN. Fokus utama *Initiative for ASEAN Integration* yaitu mengatasi kesenjangan pembangunan dengan melakukan pengembangan pembangunan bagi negara anggota baru ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan, *Initiative for ASEAN Integration* didorong oleh 3 tahapan rencana kerja atau *work plan*. *Work plan* pertama tahun 2002-2008 yang telah disahkan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN pada KTT ke-8 tahun 2002 di Phnom Penh, Kamboja yang memiliki prioritas penanganan infrastruktur (bidang transportasi dan energi), pengembangan sumber daya manusia (kapasitas sektor bangunan publik, tenaga kerja dan lapangan kerja serta pendidikan tinggi), informasi dan teknologi komunikasi (ICT) dan integrasi

ekonomi regional (perdagangan barang dan jasa, standar dan investasi), serta pariwisata dan pengentasan kemiskinan. (Sekretariat ASEAN, 2016)

Program rencana kerja IAI difokuskan pada proyek-proyek yang diarahkan pada penguatan kapasitas, kemampuan negara-negara CLMV dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan di hadapi, hal ini juga mempersiapkan negara CLMV untuk menghadapi persaingan global. Permasalahan utama di negara-negara CLMV yaitu kapasitas produktif dari sumber daya manusia, kebijakan, kelembagaan dan kerangka hukum yang masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN-6, faktor-faktor tersebut menjadi penghambat dalam optimalisasi bantuan luar negeri.

ASEAN-6 berkontribusi terhadap rencana program kerja IAI dengan memberikan pelatihan, ahli teknis dan peralatan selain itu sebelas negara mitra wicara dan lembaga pembangunan internasional juga mendukung proyek rencana kerja IAI dengan memberikan bantuan dana. Sebagai contoh, Jepang yang memperkuat dukungannya terhadap realisasi rencana kerja IAI dibawah skema ASEAN-Japan *Plan of Action*.

Berdasarkan *Report on the Mid-Term Review of the IAI Work Plan* menunjukkan isu permasalahan yang menjadi perhatian yaitu i) lemahnya mekanisme koordinasi antar-lembaga, pelaporan, pelaksanaan dan tindakan; dan ii) kebutuhan untuk memperkuat kepemilikan proyek IAI oleh negara-negara CLMV. Berikut ini beberapa contoh proyek rencana kerja pertama (2002-2008) yang dilakukan oleh Jepang terhadap perannya untuk meningkatkan integrasi ASEAN dan mengurangi kesejangan pembangunan. (*Progress of IAI Work Plan I*, 2006)

1. Pembangunan Transportasi

Proyek ini merupakan Pelatihan perkereta-apian untuk negara CLMV (berisikan 5 komponen pelatihan, 16 peserta untuk tiap komponen. komponen 1 dan 2: 3-24 Mei 2004, komponen 3 and 4: 7-28 Maret 2005, komponen 5

dilaksanakan pada 4-22 April 2005). Pemberi dana nya adalah Indonesia & Japan-ASEAN General Exchange Fund (JAGEF).

2. HRD-Labour & Kepegawaian

Program peatihan peningkatan kapasitas Capacity untuk pendidikan teknik kejuruan dan pelatihan untuk negara CLMV (aktivitas 1 telah dilaksanakan di Ho Chi Minh City, 2-20 Aug 2004 with 15 peserta dari negara CLMV: 4 dari Kamboja, 4 dari Laos, 4 from Myanmar, dan 3 dari Viet Nam. Aktivitas 2 telah dilaksanakan di Manila pada 18-29 Oktober 2004 untuk 16 pesera). Pemberi danyanya adalah Philippines & ASEAN Foundation (Japan-ASEAN Solidarity Fund).

Proyek diatas menggambarkan salah salah contoh dari bagian program yang telah dilakukan oleh Jepang untuk meningkatkan integritas ASEAN dalam upayanya menurunkan tingkat kesenjangan yang terjadi pada negara CLMV dengan ASEAN-6. Jepang memberikan bantuannya berupa pinjaman lunak ataupun pelatihan pengembangan sumberdaya, lembaga dari jepang yang biasa memberikan bantuan untuk ASEAN adalah pemerintah Jepang, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF)*, *Japan-ASEAN General Exchange Fund (JAGEF)*, *Through ASEAN-Foundation (Japan-ASEAN Solidarity Fund)*, *Japan Overseas Development Cooperation (JODC)*.

Berikut ini daftar kontribusi bantuan yang telah dilaksanakan pada IAI *Work Plan I* dari *Dialogue Partners ASEAN* termasuk Jepang dan *Development Agencies*.

Tabel 1 Kontribusi bantuan dari *Dialogue Partners* dan *Development Agencies* untuk The Initiative for ASEAN Integration Work Plan 1

| No. | Dialogue Partners & Development Agencies | Jumlah Proyek | Nominal pendanaan dari donor (USD) | Nominal pendanaan dari donor (lain-lain) |
|-----|---|---------------|------------------------------------|--|
| 1. | Jepang | 47 | 6,414,700 | |
| | a. Pemerintah Jepang | 2 | 583,168 | |
| | | 1 | | ¥87,516,000 |
| | b. Japan-ASEAN <i>General Exchange Fund</i> (JAGEF) | 16 | 2,946,251 | |
| | c. Melalui ASEAN-Foundation (Japan-ASEAN <i>Solidarity Fund</i>) | 4 | 350,928 | |
| | d. Japan <i>International Cooperation Agency</i> (JICA) | 19 | 697,976 | |
| | e. Japan <i>Overseas Development Cooperation</i> (JODC) | 1 | 30,000 | |
| | f. Japan-ASEAN <i>Integration Fund</i> (JAIF) | 4 | 1,806,378 | |
| 2. | Korea Selatan | 6 | 5,125,127 | |
| 3. | India | 5 | 3,272,066 | |
| 4. | Uni Eropa | 3 | 812,246 | |
| | | 1 | | € 110,000 |
| | | 1 | | € 69,948 |
| 5. | Denmark | 1 | 622,395 | |
| 6. | Selandia Baru | 2 | 176,056 | |
| 7. | <i>United Nations Development Programme</i> (UNDP) | 7 | 456,310 | |
| 8. | World Bank | 2 | 391,913 | |
| 9. | Australia | 3 | 1,043,350 | |

Sumber: Status Update of The IAI Work Pan 1, ASEAN.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa bantuan yang diberikan Jepang dominan dibandingkan *dialogue partners* dan *development agencies* lainnya pada IAI *Work Plan I*. Kemudian, pada KTT ASEAN ke-13 tahun 2007 di Singapura para pemimpin ASEAN sepakat bahwa mengurangi kesenjangan pembangunan di antara anggota ASEAN merupakan tugas penting yang akan membawa manfaat bagi integrasi ASEAN. Upaya ini menjadi lebih mendesak dengan percepatan realisasi komunitas ASEAN tahun 2015.

IAI *Work Plan I* telah dilaksanakan pada periode 2002-2008 dengan pelaksanaan jumlah program sebanyak 134 dan telah menarik investasi sekitar USD 191 juta dari ASEAN-6 dan sekitar USD 20 juta dari *dialogue partners*, *development agencies* dan partner lainnya. Jumlah ini belum termasuk dukungan substantif IAI lainnya yang diberikan langsung pada negara CLMV atau proyek-proyek lainnya yang dilaksanakan di sub-regional CLMV. Demi mencapai integrasi ekonomi yang lebih dekat bagi anggota ASEAN maka IAI *Work Plan* diperluas lagi menjadi IAI *Work Plan II* untuk periode tahun 2009-2015. Upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan diantara negara CLMV dengan ASEAN-6 telah membawa IAI *Work Plan II* merujuk pada formulasi cetak biru ASEAN *Community* yang terdiri dari ASEAN *Economic Blueprint*, ASEAN *Socio Cultural Blueprint* dan the ASEAN *Political Security Blueprint*. Lalu, pelaksanaan IAI *Work Plan II* ini tentu tidak terlepas dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh selain negara ASEAN-6, dalam hal ini fokus pada peran apa yang dilakukan Jepang di IAI *Work Plan II* sebagai salah satu mitra wicara ASEAN yang sekaligus pemberi dana terbesar bagi integrasi ASEAN pada IAI *Work Plan I*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “**Bagaimana peran Jepang dalam *The Initiative for ASEAN Integration Work Plan II* sebagai upaya peningkatan integrasi ASEAN**”?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja kerjasama yang dilakukan ASEAN dan Jepang.
2. Untuk mengetahui dan memahami kerangka *The Initiative for ASEAN Integration Work Plan* sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangun di ASEAN.
3. Untuk mengetahui dan memahami peranan Jepang dalam integrasi ASEAN.

4. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana usaha yang harus dilaksanakan oleh negara ASEAN-6 untuk mengurangi kesenjangan dengan negara CLMV.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Secara akademis, manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi serta data di dalam program studi Hubungan Internasional terutama konsentrasi Ekonomi Politik Internasional mengenai kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN-Jepang
2. Secara praktis, manfaat yang didapatkan adalah untuk memberikan pemahaman mengenai peran Jepang dalam *The Initiative for ASEAN Integration Work Plan II* sebagai upaya mengurangi kesenjangan pembangunan di ASEAN.

I.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang pertama dari *Working Paper* ILO Asia-Pacific, October 2014 oleh Hitoshi Sato yang berjudul **How Can ASEAN And Japan Mutually Benefit From ASEAN Economic Integration?** Dalam tulisan ini fokus terhadap bagaimana integrasi ekonomi ASEAN akan mempengaruhi hubungan ekonomi ASEAN-Jepang dan bagaimana Jepang serta negara-negara ASEAN saling mendapatkan keuntungan dari integrasi ekonomi. Pada dasarnya, integrasi ASEAN berupaya untuk menghasilkan pasar yang terintegrasi dengan cakupan yang lebih besar, yang juga memberikan peluang untuk menghasilkan keuntungan. Pengurangan biaya perdagangan dalam ASEAN akan meningkatkan pembagian kerja di wilayah tersebut, yang pada akhirnya tidak hanya saja keuntungan standar dari perdagangan tetapi juga jaringan produksi baru yang membentang ke negara Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV). Selain itu, pasar terpadu yang lebih besar dan lingkungan bisnis yang lebih baik yang dihasilkan oleh integrasi ASEAN mampu menarik investasi asing langsung baru.

Namun, keuntungan dari integrasi ekonomi tersebut bergantung pada implementasi yang sesuai. Sehingga kemajuan integrasi ASEAN harus dipantau. Bahkan sebelum peluncurannya, rencana integrasi ASEAN saat ini memiliki setidaknya tiga kelemahan: (i) tidak cukup liberalisasi dalam perdagangan jasa; (ii) kurangnya aturan tentang pengadaan pemerintah; dan (iii) kurangnya kebebasan perpindahan tenaga kerja.

Penghapusan kesenjangan pembangunan daerah merupakan tujuan penting lainnya dari integrasi ASEAN. Jepang telah mendukung pengurangan kesenjangan pembangunan di ASEAN, terutama dengan membantu negara-negara Mekong melalui, ODA. Jika tidak ada ukuran biaya perdagangan maka negara tidak akan peduli terhadap kesejahteraan dan negara-negara yang lebih besar cenderung mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, sedangkan negara-negara yang lebih kecil cenderung kehilangan peluang karena pasar yang lebih besar. Akibatnya, hal ini juga penting bagi negara-negara kecil untuk menghilangkan hambatan perdagangan sepanjang masih memungkinkan dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja.

Quah Boon Huat dalam research papernya dari *Malaysian Institute of Economic Research*, Maret 2008 yang berjudul “**CLMV Development Assistance Programmes: Background, Apporaches, Concerns**” memaparkan bahwa apakah IAI *Work Plan* menjadi isu yang efektif dalam meningkatkan integrasi negara anggota ASEAN khususnya negara CLMV dengan ASEAN-6. Menurutnya dalam program IAI *Work Plan* harus mengedepankan pembangunan kapasitas atau program pengembangan yang targetnya untuk manusia dan kapasitas institusional, serta membangun keterampilan pembuat keputusan dan analisis dalam maksud atau tujuan yang berkelanjutan.

Research paper ini fokus terhadap pembahasan efektifkah IAI program dilihat dari laporan *mid term* IAI *Work Plan* I periode 2002-2008. Untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan pembangunan, perlu ditekankan bahwa proyek dan target program-program anggota yang belum maju harus disusun secara terpisah untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing negara karena perbedaan laju reformasi dan tingkat kinerja sosial ekonomi.

Untuk memfasilitasi proses ini, negara-negara penerima bantuan harus memiliki masalah pembangunan mereka sendiri dan menentukan hasil akhir dari kapasitas upaya pembangunan karena “*capacity building ... isn't a process where an organization external to the process can determine the final outcome*”. Untuk tujuan ini, unit khusus harus dibentuk di setiap negara CLMV, jika mereka belum memiliki atau melaksanakan kegiatan yang mencakup:

1. Melakukan pelatihan analisis untuk mengidentifikasi masalah atau isu-isu lain dalam kebutuhan di tempat kerja dan berdasarkan hasil, bekerja sama dengan ASEAN-6 dalam mengimplementasikan rancangan program pembangunan kapasitas yang relevan untuk target pelatihan spesifik yang mereka butuhkan.
2. Memastikan bahwa peserta pelatihan yang dikirim tepat dengan pelatihan dan benar-benar dapat menerapkan apa yang telah dipelajari di tempat kerja mereka, dan
3. Pegukuran perubahan dalam performa kerja peserta, mengevaluasi apakah perubahan sudah cukup besar untuk mempengaruhi kinerja organisasi, serta menilai apakah dampak dari hal yang telah dilakukan dapat bertahan.

ASEAN sangat membutuhkan bantuan upaya dalam mengurangi kesenjangan pembangunan. Terlihat jelas masalah dari efektivitas IAI *Work Plan*, merujuk pada Laporan *Mid Term The IAI Work Plan* bahwa terdapat banyak masalah, diantaranya adalah kualitas yang rendah dari beberapa program dan kurangnya koordinasi antara ASEAN dan kerangka kerja pembangunan lainnya di lembah sungai Mekong ini. Agar *Work Plan* IAI menjadi lebih berarti, harus juga dimasukkan lebih mendalam berbagai program lainnya sebagai contoh program ADBsponsored GMS Economic Cooperation atau yang lebih utama program bantuan pembangunan fokus pada negara CLMV. Karena semua itu ASEAN tidak perlu mengeluarkan pendanaan lebih untuk mendanai IAI *Work Plan*.

Dalam *research paper* ini terlihat bahwa penilaian yang dilakukan berdasarkan laporan *Mid Term The IAI Work Plan I*, dalam pelaksanaan IAI *Work Plan I* terlihat berjalannya program yang dilakukan yaitu sebanyak 232 Proyek dengan presentasi berjalan baik sebesar 100%, yang membedakan penelitian yang

penulis lakukan dengan research paper ini adalah analisis efektivitas nya tidak hanya dilihat dari laporan *Mid Term* atau laporan *The IAI Work Plan* nya saja tetapi penulis akan melakukan analisis nya dengan mendapatkan informasi tambahan dari *dialogue partners* ataupun *development agencies* yang juga berkontribusi terhadap pendanaan *IAI Work Plan* khususnya *dialogue partners* dan *development agencies* dari Jepang, karena fokus penelitian penulis adalah peran Jepang.

Tinjauan Pustaka yang ketiga adalah ***ASEAN Integration Report 2015*** yang dikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN pada November 2015. Report ini merupakan report menyeluruh dari progres dan pencapaian serta evaluasi dampak dari adanya integrasi ekonomi ASEAN. Sejak mengadopsi cetak biru ASEAN *Economic Community* di tahun 2007, report ini mencakup 4 pilar dari AEC 2015 yaitu (i) pasar tunggal dan basis produksi; (ii) ekonomi regional yang kompetitif; (iii) pembangunan ekonomi yang adil dan (iv) integrasi ASEAN menuju ekonomi global. Integrasi regional akan terus memberikan kontribusi bagi ketahanan ekonomi dan kinerja pertumbuhan.

Melihat tahun 2015 dan seterusnya, landscape makro ekonomi ASEAN akan terus berlanjut bertransformasi ke arah persaingan kondisi ekonomi global. Terus berupaya untuk mengimplementasikan inisiatif integrasi ekonomi telah diwujudkan dalam ASEAN *Economic Community* yang memiliki signifikansi dan pengaruh positif pada perdagangan dan FDI, mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah Asia Tenggara serta merangsang struktural transformasi ekonomi negara-negara ASEAN.

Mengejar pembangunan ekonomi yang adil yang terdapat pada pilar ketiga cetak biru AEC adalah salah satu bentuk upaya pembentukan IAI yang dikhususkan bagi anggota baru ASEAN yaitu negara CLMV, dengan memfokuskan juga pada pengembangan usaha kecil dan menengah, perkembangan serta kemampuan diantara negara anggota ASEAN dapat menjadi pertimbangan dalam agenda integrasi ekonomi ASEAN. Dalam hal ini IAI telah diluncurkan sejak tahun 2001 untuk mengurangi kesenjangan pembangunan melalui kerangka kerjasama regional

Terkait integrasi ASEAN, di tahun 2011 telah disetujui *the ASEAN Framework for Equitable Economic Development* oleh negara-negara ASEAN untuk memberikan panduan prinsip-prinsip untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua sektoral dan kementerian di bawah AEC. Inisiatif ini bersamaan dengan berhasilnya 285 proyek berjumlah USD 20.3 juta dalam implementasi IAI *Work Plan* kedua yang telah memberikan kontribusi untuk membantu negara CLMV dalam membangun kapasitas umum untuk berpartisipasi dalam proses integrasi yang lebih signifikan. Namun harus lebih ditekankan kembali apa yang menjadi tujuan dan sasaran mendasar yang ingin dicapai dalam mengurangi kesenjangan pembangunan di antara negara-negara ASEAN.

Report ini menjadi rujukan penulis dalam melihat perkembangan integrasi ekonomi yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN sesuai pada laporan sekretariat ASEAN tahun 2015, kemudian laporan ini akan menjadi bahan analisis penulis dalam melihat efektifitas IAI terhadap integrasi ASEAN sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di negara-negara ASEAN.

I.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Teori Peran

Saat ini, secara umum teori peran berkaitan dengan sumber dan faktor yang membentuk peran nasional sedangkan teori peran menurut Amerika cenderung menekankan materi aktor atau ciri-ciri kognitif sebagai penentu dan yang menjaga stabilitas sebagai sebuah tindakan aktor tersebut. Peran adalah posisi sosial yang dibangun oleh ego dan keinginan untuk mengubah ekspektasi sehubungan dengan tujuan seorang aktor untuk mengorganisasikan sebuah grup. Posisi fungsi di grup, terbatas oleh waktu dan cakupan yang bergantung pada struktur dan tujuan grup. Ekspektasi peran ditujukan untuk aktor yang bekerjasama seperti negara dan organisasi internasional. Disisi lain aktor tersebut meliputi ekspektasi ego, yaitu ekspektasi domestik atau individual yang sesuai dengan perannya dan implikasinya. Dan mengubah ekspektasi adalah permintaan

secara implisit dan eksplisit dari pihak lain (peran pelengkap). (Harnisch, Sebastian, 2011: 8-9)

Teori peran membangun jembatan empiris antara agent dan struktur dalam hubungan internasional. Agent atau individual tersebut biasa bekerja sendiri di dalam grup yang telah menanamkan nilai sosial dan budaya sebagai suatu yang mewakilkan pembuatan keputusan kebijakan luar negeri sebuah negara.

Berbicara tentang peran dan identitas, link mendasar antara dua konsep tersebut adalah adanya timbal balik atau *co-constitution*. Di satu sisi aktor harus merumuskan rencana dan melakukan kegiatan tertentu dalam batas-batas peran mereka yang pada gilirannya memperkuat dukungan dan mengkonfirmasi atau menyatakan adanya identitas mereka. Logika konsekuensial mengikuti arah yang ketat, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. (Harnisch, Sebastian, 2011: 83)

Role → Behavior → Identity

Peran dan identitas tidak dapat dipisahkan. Dalam penelitian ini terlihat bahwa peran yang dilakukan Jepang membentuk identitas bagi Jepang itu sendiri. Peran Jepang sangat mendominasi di kawasan ASEAN dalam proses integrasi kawasan khususnya negara-negara CLMV, hal tersebut yang dilakukan oleh Jepang membuat adanya ekspektasi yang diharapkan oleh aktor-aktor lain di kawasan itu. Sehingga kehadiran Jepang dianggap sebagai peran yang penting bagi terciptanya integrasi kawasan.

I.6.2 Teori Integrasi Regional

Konstelasi hubungan internasional telah berubah secara drastis (pasca Perang Dingin) dunia diwarnai oleh polarisasi yang telah mendorong kawasan dunia berkembang dan dunia maju mempertegas kembali keberadaannya. Kecenderungan itu bila dihadapkan dengan

masalah tatanan ekonomi dunia, ternyata masih tetap tidak dijumpai keadilan. Fenomena negara berusaha untuk menjaga stabilitas perdamaian serta pengaturan bersama menjadi perhatian setiap negara, karena hal tersebut upaya menjaga stabilitas perdamaian terus berlangsung di organisasi dan komunitas yang mendefinisikan mereka sebagai “regional” (Ernst B. Haas, 1976: 174).

Teori integrasi cenderung menganggap bahwa setiap proses kerjasama regional, koordinasi, atau usaha sentralisasi diantara negara-negara anggota harus terkonseptualisasikan sebagai arah yang dapat menghasilkan sebuah hasil. Teori federalis dari integrasi regional mempertahankan relevansi dimana sebuah grup yang terdiri dari aktor-aktor berkomitmen untuk memperkenalkan sebuah tujuan yang spesifik pada saat tertentu untuk beberapa waktu tertentu (Ernst B. Haas, 1976: 176-177).

Kelompok aktor yang tergabung dalam sebuah grup yang memiliki komitmen mempertahankan nilai keamanan, keseimbangan, efisiensi dan keselarasan, nilai-nilai tersebut menentukan sikap terhadap pilihan mereka. Teori fungsionalis dan neo-fungsionalis memiliki dua kondisi keterkaitan dengan bagaimana regional bertindak untuk mencapai integrasi regional, dua kondisi tersebut yaitu (Ernst B. Haas, 1976: 178):

1. Kelembagaan harus terbuka terhadap berbagai kemungkinan dari setiap negara. Pengambilan keputusan secara kolektif sebagai proses awal dari regional yang terpusat.
2. Tantangan untuk memasukkan tugas umum dan program negara tidak dapat diselesaikan pada sentralisasi regional. Proses integrasi regional akan menciptakan pola-pola interdependensi diantara aktor-aktor di dalam regional.

Integrasi sosial dan ekonomi dapat dibandingkan dengan interdependensi, namun tidak ada perbedaan yang begitu jauh diantara keduanya. Perbedaannya hanya pada bagaimana aktivitas dan peristiwa

tersebut dilakukan dengan mengambarkannya sebagai ekonomi ataupun sosial (Ernst B. Haas, 1976: 210)

Jepang sebagai salah satu aktor yang meningkatkan integrasi kawasan ASEAN terutama negara-negara CLMV menjadikan Jepang sebagai aktor yang juga menjaga stabilitas kawasan ASEAN. Di saat proses pengintegrasian yang dilakukan oleh Jepang maka aktor-aktor lain di dalam sebuah regional akan lebih fokus terhadap proses integrasi dan tidak begitu fokus pada ancaman keamanan, Jepang menjadi balancer dengan melakukan perannya sebagai negara yang membantu proses integrasi kawasan ASEAN.

1.6.2 Konsep *The Initiative for ASEAN Integration*

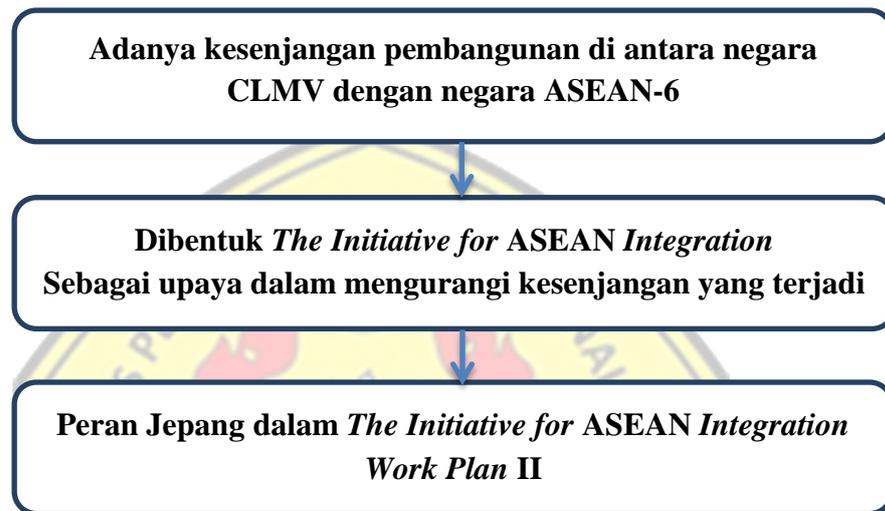
The Initiative for ASEAN Integration bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi ekonomi negara-negara anggota baru ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV). Upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dibagi kedalam tiga rencana kerja:

1. Rencana Kerja pertama 2002-2008: berfokus pada pengembangan yang ditujukan membantu negara-negara CLMV untuk memastikan roda perekonomian berkembang dengan cepat.
2. Rencana Kerja kedua 2009-2015: berfokus pada program-program kunci yang terdapat pada cetak biru, komunitas ASEAN yaitu cetak biru ASEAN *Political-Security Community*, ASEAN *Economic Community* dan ASEAN *Socio-Cultural Community*.
3. Rencana Kerja ketiga: berfokus pada peningkatan implementasi di 5 sektor strategis yang telah diidentifikasi yaitu *Food Agriculture, Trade Facilitation, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), education* dan *Health and Well-Being*

Proyek rencana kerja meliputi identifikasi yang tepat terhadap kebutuhan CLMV yang meliputi pentingnya proyek rencana pembangunan nasional negara CLMV untuk berpartisipasi dalam program ASEAN,

kesinambungan dan jangka panjang, serta daya serap negara CLMV. Daam pelaksanaanya rencana kerja pertama dan kedua telah memberikan kontribusi bagi negara CLMV dalam membangun kapasitas umum untuk berpartisipasi dalam proses integrasi yang lebih signifikan.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

1. *The Initiative for ASEAN Integration* merupakan integrasi regional ASEAN untuk mengurangi kesenjangan pembangunan yang terdapat di antara negara CLMV dengan ASEAN-6 .
2. Jepang sebagai negara pemberi bantuan terbesar ke ASEAN dalam *The Initiative for ASEAN Integration* mampu memaksimalkan perannya dalam meningkatkan integrasi ASEAN dengan mengurangi kesenjangan pembangunan di antara negara CLMV dengan ASEAN-6

3. *The Initiative for ASEAN Integration* adalah rencana kerja yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di antara negara anggota ASEAN.

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang mengutamakan adanya data. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan peran Jepang terhadap peningkatan integrasi ASEAN dan difokuskan untuk menganalisa apakah peran yang dilakukan Jepang dalam kerangka *The Initiative for ASEAN Integration Work Plan II* efektif dalam proses terjadinya integrasi di ASEAN dalam hal ini kesenjangan pembangunan antara negara CLMV dengan ASEAN-6.

I.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer adalah data-data yang secara langsung didapatkan dari bahan wawancara dengan melakukan wawancara bersama *agencies partner* atau *development agencies* untuk ASEAN Jepang di Indonesia yaitu ASEAN-Foundation (Japan-ASEAN *Solidarity Fund*), Japan *International Cooperation Agency* (JICA), serta Perwakilan Tetap Jepang untuk ASEAN, dokumen resmi yaitu berupa laporan dari Work Plan I dan juga Work Plan II yang dikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN, dan dokumen tidak resmi dari instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan, data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diambil dari berbagai penelitian terdahulu baik berupa jurnal-jurnal nasional maupun internasional, buku-buku, artikel, majalah, surat kabar, *press release* dan lain-lain. Untuk data-data sekunder ini, metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah *based on internet*

research dan *documentary research* yang terkait dengan The Initiative for ASEAN Integration Work Plan I dan II.

I.9.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penjelasan suatu permasalahan yang dijelaskan berdasarkan data-data dan fakta dan kemudian menghubungkan fakta dengan kerangka pemikiran.

Analisis data dilakukan dengan memperoleh sumber-sumber dari buku, media, pakar ataupun hasil dari penelitian orang terdahulu, dan lain-lain yang kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka pemikiran yang dipilih.

I.10. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian ini secara menyeluruh, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pembuka yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran singkat tentang penelitian ini.

BAB 2 : THE INITIATIVE FOR ASEAN INTEGRATION

Pada bab ini akan memuat pembahasan mengenai hubungan kerjasama yang dilakukan antara ASEAN-Jepang dan pembahasan *The Initiative for ASEAN Integration Work Plan* pertama 2002-2008 yang telah dilaksanakan.

BAB 3 : THE INITIATIVE FOR ASEAN INTEGRATION WORK PLAN II

Pada bab ini akan membahas mengenai analisa peran Jepang terhadap peningkatan Integrasi ASEAN sebagai upaya mengurangi kesenjangan pembangunan di negara CLMV dan ASEAN-6 dalam kerangka *The Initiative for ASEAN Integration Work Plan II*.

BAB 4 : PENUTUP

Bab ini akan beisikan kesimpulan dari pembahasan mengenai peran yang dilakukan Jepang terhadap peningkatan integrasi di ASEAN dalam upaya mengurangi kesenjangan negara CLMV dengan ASEAN-6 dalam kerangka *The Initiative for ASEAN Integration Work Plan II*.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

